

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ide Juang Humantito  
Jabatan : Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I

Selanjutnya disebut pihak pertama

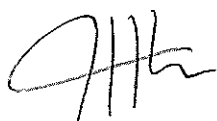
Nama : Piping Effrianto  
Jabatan : Plh. Direktur Investigasi Instansi Pemerintah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Piping Effrianto  
NIP 19640411 198403 1 001

Jakarta, 28 Agustus 2017  
Pihak Pertama,



Ide Juang Humantito  
NIP 19760110 199601 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SUB DIREKTORAT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT I**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	<b>Sasaran Program</b>		
1	Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	40%
		Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	70%
		Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	60%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	50%
		Persentase auditor yang memiliki kompetensi ( <i>hard &amp; soft competency</i> ) di bidang pencegahan	60%
3	Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	60%
4	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah di bidang keinvestigasian	Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian	60%
	<b>Sasaran Kegiatan</b>		
	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah	Jumlah laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara	2
		Jumlah laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE)	1

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah laporan pemberian keterangan ahli	5
		Jumlah laporan FCP	1
		Jumlah laporan pemantauan/ monitoring/QA	20
		Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis	1